



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa indikator kinerja utama perangkat daerah yang perlu dioptimalkan sehingga menjadi lebih SMART (*specific, measurable, acievable, relevan dan time bound*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut :

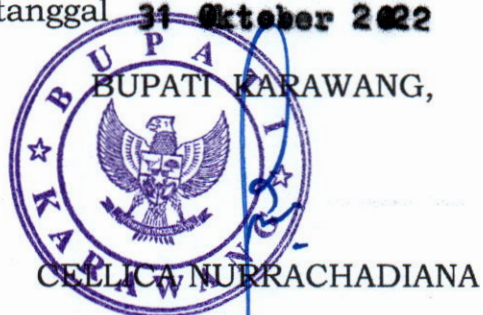
Ketentuan mengenai Lampiran II Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **68** .

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 67 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN  
 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 KARAWANG TAHUN 2021-2026

**I. SEKRETARIAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya Kualitas Laporan Pembangunan Daerah	SKOR LPPD Kabupaten	$\text{Nilai LPPD} = \text{Penilaian Kemendagri}$	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang/Jasa serta Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pengelolaan barang/jasa dan Opini Audit BUMD	$\text{Realisasi Layanan Barjas} = \frac{\text{Implementasi } \Sigma \text{ paket pengadaan}}{\Sigma \text{ Rencana Pengadaan}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah	
				$\text{Realisasi Opini Audit} = \frac{\Sigma \text{ BUMD WTP}}{\Sigma \text{ BUMD}} \times 100\%$		
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akip SETDA	Tingkat AKIP Setda -Laporan Hasil Evaluasi INSPEKTORAT	Sekretariat Daerah	

## II. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	1. Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	1. Persentase (%) Keselarasan muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun (n), terdiri atas :			Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
			a) Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Prioritas Daerah/PD)	$\frac{\% \text{ Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PD)}}{\text{Rata-rata (Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah (PP) yang sesuai dengan RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)}} \times 100\%$		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			b) Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Prioritas Daerah/PD)	$\frac{\% \text{ Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PD)}}{\text{Rata-rata (Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah (PP) yang sesuai dengan RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)}} \times 100\%$		Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			c) Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Prioritas Daerah/PD)	$\frac{\% \text{ Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (PD)}}{\text{Rata-rata (Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah (PP) yang sesuai dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)}} \times 100\%$		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			2. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, terdiri atas :		Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	
			a) Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\% \text{ Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}} \times 100\%$		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			b) Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	$\frac{\% \text{ Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam}}{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam}} \times 100\%$		Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
			Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
			c) Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	$\frac{\% \text{ Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}}{\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}}{\text{Jumlah rekomendasi penyusunan renja yang dikeluarkan oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}}} \times 100\%$	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	1. Persentase (%) hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dan dipublikasikan		Bidang Penelitian dan Pengembangan	
			a) Persentase hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti untuk mendukung kebijakan daerah	$\frac{\% \text{ hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti untuk mendukung kebijakan daerah}}{\frac{\text{Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kajian atau penelitian yang dilakukan}}} \times 100\%$		
			b) Persentase hasil kelitbangan yang dipublikasikan kepada pemangku kepentingan	$\frac{\% \text{ hasil kelitbangan yang dipublikasikan kepada pemangku kepentingan}}{\frac{\text{Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan kepada pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah kajian atau penelitian yang dilakukan}}} \times 100\%$		

### III. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel	1. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	(Persentase kesesuaian dokumen penganggaran + Persentase Penetapan APBD tepat waktu + Presentase pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> sesuai dengan Perundang- undangan + Persentase Tertib administrasi penatausahaan keuangan + Persentase kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerijtah) dibagi 5	BPKAD	
			2. Persentase Pengelolaan Aset Daerah	(Persentase tertib penatausahaan Barang Milik Daerah + Persentase pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BPKAD) dibagi 2		



#### IV. BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{Jumlah PAD Tahun } n) - (\text{Jumlah PAD Tahun } n-1)}{\text{Jumlah PAD Tahun } n-1} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase (%) Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Jumlah Pajak Daerah Tahun } n}{\text{Jumlah PAD Tahun } n} \times 100\%$		

**V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA (BKPSDM)**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel dan kapabel	Meningkatkan standar penerapan sistem merit	Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri	Peraturan KASN no. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Jumlah capaian nilai merit system hasil penilaian Mandiri (aplikasi SIPINTER)	BKPSDM Kabupaten Karawang	

**VI. INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD rata-rata pertahun	<p>Jumlah akumulasi Nilai AKIP OPD</p> <hr/> <p>Jumlah OPD</p>	Inspektorat	

**VII. SEKRETARIAT DPRD**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase memfasilitasi Raperda Kabupaten Karawang	( Realisasi Raperda / Target Raperda ) x 100%	Sekretariat DPRD	

**VIII. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kab/Kota} / {Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kab/Kota} x 100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Total jumlah cabang olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

## IX. DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Angka Kesakitan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan kasus baru}}{\text{Jumlah penduduk pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	
			Rasio Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu (hamil, bersalin, nifas 42 hari) pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$		
			Rasio kematian bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$		
			Persentase Angka Stunting	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama}} \times 100\%$		

## X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sekunder pada daerah irigasi dibawah 1000 Ha	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi baik	panjang jalan dalam kondisi baik/ total panjang jalan kabupaten x 100	Dinas PUPR	
			Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik/total jumlah jembatan kabupaten x 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten (Km) X 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Nilai/ Score SIPJAKI	Nilai layanan informasi jasa konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dinas PUPR	
		Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	Dinas PUPR	
		Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku x 100	Dinas PUPR	

## XI. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Tercapainya universal akses (kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dibagi target jumlah penanganan rumah tidak layak huni X 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Kumuh yang ditangani dibagi jumlah luasan total kawasan kumuh di Kabupaten Karawang (SK Bupati) x 100	Dinas PRKP	
			Persentase Pembangunan Rumah Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah korban bencana dibagi jumlah total terkena bencana x 100	Dinas PRKP	
			Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah Total unit rumah di Kabupaten x 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih melalui SPAM jaringan perpipaan + Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih melalui SPAM Non Perpipaan dibagi jumlah rumah tangga X 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui layanan SPALD	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui layanan SPALD-S + SPALD-T / Jumlah Rumah di Kabupaten x 100	Dinas PRKP	
		Meningkatnya tertib administrasi aset pemda yang berasal dari pengembang perumahan dan pengadaan tanah	Persentase peningkatan jumlah penyerahan kewajiban pengembang Perumahan menjadi aset pemda dan pengadaan tanah milik Pemda	(Jumlah PSU yang diserahkan dibagi jumlah Perumahan di Kab. Karawang) + (jumlah TPU yang diserahkan dibagi jumlah perumahan yang sedang berproses perizinan) + (jumlah pengadaan tanah pemda di bagi target pengadaan tanah tahun n) x 100	Dinas PRKP	



**XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Karawang	Persentase Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{((\text{Jumlah kasus tahun (n-1)} - \text{jumlah kasus tahun (n)}) / \text{Jumlah kasus tahun (n)}) \times 100}{}$ Sumber : Rekap data pelanggaran Perda dan Perkada	Satpol PP	

**XIII. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan politik berwawasan kebangsaan guna mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik berwawasan kebangsaan per tahun	Akumulasi penambahan masyarakat yang dibina setiap tahun	Kesbangpol	

**XIV. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Meningkatnya penerapan standarisasi dan mekanisme, masyarakat sadar bencana serta terlaksanakannya penanganan bencana yang sinergis dan terintegrasi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	<p>Formulasi :</p> <p>Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan+ Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu+ Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik+ Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana+ Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana+ Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana+ Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana)/7</p>	BPBD	
		Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	(Jumlah layanan pemadamam, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota/Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota) x 100%		

**XV. DINAS SOSIAL**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya akses pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dengan tingkat kesejahteraan level 1 dan 2 (desil 1 dan desil 2)	Persentase PPKS desil 1 dan desil 2 yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	Formula : Jumlah PPKS yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS keseluruhan dikali 100%  Sumber : Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/Huk/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024	Dinas Sosial	

**XVI. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dan Kualitas Perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) Pada belanja langsung APBD	(Jumlah ARG pada belanja langsung APBD)/(jumlah seluruh anggaran belanja langsung di kabupaten) x 100	DP3A	
		Terwujudnya kota layak anak	Persentase komponen nilai indikator KLA yang terpenuhi	Jumlah nilai evaluasi KLA yang diperoleh / Jumlah total komponen nilai KLA x 100	DP3A	
		Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan termasuk TPPO	Rasio perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	(Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan)/(Jumlah penduduk perempuan) x 100.000	DP3A	
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/ Kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun )	( Jumlah Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi)/(Jumlah anak) x 100	DP3A	

**XVII. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan lapangan kerja	Persentase Pencari Kerja Karawang yang bekerja	<p><u>Formulasi Penghitungan/Rumus :</u></p> <p><b>Jumlah yang bekerja dibagi jumlah pencari kerja Karawang dikali 100%</b></p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah yang bekerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data diambil dari pelaporan/pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dimana perusahaan wajib melaporkan data pekerja yang diterima maksimal 3 hari kerja secara daring atau maksimal 7 hari kerja secara luring sejak penandatanganan PKWT</li> <li>2. Peserta pelatihan UPTD BLK Disnaker yang sudah bekerja dan atau berwirausaha</li> <li>3. Peserta pemagangan dalam dan luar negeri</li> <li>4. Pekerja Migran Indonesia yang sudah ditempatkan</li> </ol> <p>Jumlah pencari kerja Karawang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencari Kerja yang membuat Kartu Kuning melalui aplikasi infoloker (termasuk peserta pelatihan UPTD BLK dan peserta pemagangan)</li> <li>2. Calon Pekerja Migran Indonesia</li> </ol> <p>Pencari Kerja yang ber-KTP dan ber-NIK Karawang yang mendapat pekerjaan dan telah melaporkan/dilaporkan oleh perusahaan yang menerima pekerja dan yang telah berwirausaha</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j            C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)            L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j            M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>	Dinas Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ <p>I<sub>eu</sub> = 50% Indeks SO<sub>2</sub> + 50% Indeks NO<sub>2</sub></p>	Dinas Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>DKK = ∑ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>	Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbulan Sampah di Perkotaan yang Tertangani dengan Baik	Volume timbulan sampah diperkotaan yang ditangani/ total timbulan sampah diperkotaan X 100%	Dinas Lingkungan Hidup		

Catatan :  
 Sampah di perkotaan bermakna sampah di seluruh Kabupaten Karawang

**XIX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	<p><u>Formulasi Perhitungan :</u></p> $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah pemohon pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan Perekaman KTP-el	<p><u>Formulasi Perhitungan :</u></p> $\frac{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP-el yang dilakukan perekaman pada tahun (x)}}{\text{Jumlah wajib KTP-el pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK</p>		
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	<p><u>Formulasi Perhitungan :</u></p> $\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun pada tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pencatatan Sipil</p>		
			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	<p><u>Formulasi Perhitungan :</u></p> <p>Hasil kuesioner/hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan</p>		



**XX. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya Status Desa yang berdaya saing (kelembagaan, aparatur serta perekonomian desa)	Persentase peningkatan status Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes = Jumlah Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun - N dikali 100% (Tahun 2020 4 Desa Mandiri)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes = Jumlah Persentase Pengentasan Status Desa Tertinggal Tahun - N dikali 100% (Tahun 2020 24 Desa Tertinggal)		

**XXI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$	DPPKB	
		Menurunkan angka kelahiran pada PUS	Angka Kelahiran Total ( TFR ) per WUS Usia 15 - 49 Tahun	$TFR = 5 \sum_{i=15-49} ASFR_i$ ASFR <sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	DPPKB	
		Pendewasaan Usia Perkawinan	Median Usia Kawin Pertama Wanita	Rata-rata Wanita kawin pertama	DPPKB	

## XXII. DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kuantitas prasarana perhubungan	Persentase peningkatan prasarana perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan yang terpasang di tahun (n) dibagi jumlah prasarana perhubungan yang terpasang di tahun (n-1)	Dinas Perhubungan	
			Rasio konektivitas kabupaten / kota	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perhubungan	
			V/C Rasio di Jalan Kabupaten	VCR = $V/C$  Keterangan : VCR = Volume Kapasitas Rasio V = Volume Lalu Lintas C = Kapasitas Ruas Jalan	Dinas Perhubungan	

**XXIII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	Prosentase Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan SPBE meliputi Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian dari Komisi Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Indeks KAMI pada Instrumen Penilaian BSSN	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Data	Prosentase Statistik Sektoral yang diterbitkan	(Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan / Data Statistik Sektoral) x 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**XXIV. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan, pemberdayaan, Pengembangan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset dibagi jumlah seluruh koperasi aktif tahun (n) di kali 100 %	Dinas Koperasi UKM	
2	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kinerja kelembagaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro	Persentase Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil (naik Kelas)	Jumlah Usaha Mikro yang dibina dibagi Jumlah Wirasaha yang ada tahun (n) dikali 100 %	Dinas Koperasi UKM	

**XXV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Jumlah investasi tahunan di Kabupaten Karawang	DPMPTSP	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perangkat daerah	DPMPTSP	

**XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi Kabupaten Karawang	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Karawang	Jumlah realisasi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun (n) / Jumlah target kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun (n)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan	Persentase unsur pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Jumlah realisasi kebudayaan yang dikembangkan tahun (n) / Jumlah target kebudayaan dikembangkan tahun (n)  Keterangan : 1. Jumlah usulan warisan budaya tak benda Kabupaten yang ditetapkan sebagai WBTB Provinsi 2. Jumlah unsur pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

**XXVII. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Rasio Perpustakaan Persatuan penduduk (PMDN 18 2020)	jumlah perpustakaan di bagi jumlah penduduk dikali 1000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18 2020)	jumlah perpustakaan yang sesuai SNP di bagi jumlah perpustakaan di kali 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggungjawaban nasional (PMND 18 2020)	$T = ( a + I + s + j ) : 4$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemetintah, pelayan publik dan kesejah teraaan daerah	$T=(m+b+g+a+c+i):6$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



**XXVIII. DINAS PERIKANAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	<p><b>P = PT + PB</b></p> <p>P = Jumlah Produksi Perikanan (Ton)            PT = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)            PB = Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</p> <p>Sumber :            Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	Dinas Perikanan	
		Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	<p>Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemindangan (jenis produksi ikan pindang)</li> <li>- penggaraman/pengeringan (jenis produksi ikan asin)</li> <li>- fermentasi (jenis produksi terasi)</li> <li>- pelumatan daging (jenis produksi otak-otak, pempek)</li> <li>- pengasapan (jenis produksi ikan asap)</li> <li>- pengolahan ikan lainnya (jenis produksi krupuk ikan, krupuk rajungan, olahan rumput laut, popiya krezz, ikan krispy, dendeng ikan, bandeng presto, olahan gurita dan dori, mie kristal, dsb)</li> </ul>		

**XXIX. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatkan produksi pertanian	Persentase Peningkatan produksi pertanian (padi, kedelai, jamur merang, kopi, ternak)	<u>Formulasi Penghitungan :</u> (Persentase Peningkatan Produktivitas Padi + Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai + Persentase Peningkatan Produktivitas Jamur Merang + Persentase Peningkatan Produktivitas Kopi + Persentase Peningkatan Populasi Ternak) dibagi 5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Tersedianya Sistem Informasi Pangan di Kabupaten Karawang	Persentase Tersedianya Sistem Informasi Pangan	<u>Formulasi Penghitungan :</u> Sistem informasi pangan yang tersedia setiap tahun = 1) Neraca Bahan Makanan, 2)Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, 3) Informasi stok, pasokan dan Harga Pangan, 4) Dokumen Kajian SKOR PPH, 5) Infromasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Informasi Cadangan Pangan Masyarakat, 6) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Terpenuhinya Standar Ketersediaan Cadangan Pangan di Kabupaten Karawang	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	<u>Formulasi Penghitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Standar Cadangan Pangan Ideal}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**XXX. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Karawang	<p><u>Formulasi Penghitungan :</u></p> <p>Proyeksi Nilai Sektor Perdagangan PDRB ADHB dibagi Total Nilai PDRB Lapangan Usaha ADHB dikali 100% hasil perhitungan sementara Disperindag</p> <p>Catatan :            Nilai Sektor Perdagangan PDRB ADHB :            1. Data Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Karawang	<p><u>Formulasi Penghitungan :</u></p> <p>Proyeksi Nilai Sektor Industri pengolahan PDRB ADHB dibagi Total Nilai PDRB Lapangan Usaha ADHB dikali 100% hasil perhitungan sementara Disperindag</p> <p>Catatan :            Nilai sektor industri pengolahan PDRB ADHB :            1. Data industri pengolahan besar, menengah dan kecil</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

**XXXI. KECAMATAN**

No.	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit PD Penanggungjawab	Ket.
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan .....	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) .....	Kepuasan masyarakat dari hasil perhitungan survei indeks kepuasan masyarakat setiap tahun pada saat layanan kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan melalui musrenbang, siskamling	Kecamatan	

  
 BUPATI KARAWANG,  
 CELICA NURRACHADIANA